Analisis Penjaminan Mutu Pendidikan Berbasis Nilai Kearifan Lokal Pancawaluya dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan

Fakhrul Kurniawan[1], *Mochamad Kafi Al Habsi*[2]

[1] Prodi Sosiologi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UPBJJ Bandung
[2] SMA Kartika XIX-1 Bandung

[1]kurniawan.fakhrul26@gmail.com
[2]mochkafialhabsi@gmail.com

Abstrak

Penjaminan mutu pendidikan di Indonesia telah memiliki mekanisme sistematis melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) namun pelaksanaannya masih cenderung berorientasi teknis administratif dan belum banyak mempertimbangkan dimensi sosial budaya sekolah, sementara kearifan lokal Pancawaluya (*cageur, bageur, bener, pinter, singer*) di Jawa Barat masih dikaji terbatas pada isu pendidikan karakter dan belum dihubungkan secara khusus dengan sistem penjaminan mutu. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan penjaminan mutu pendidikan dan kearifan lokal Pancawaluya dalam perspektif sosiologi pendidikan, mengidentifikasi bentuk integrasi kelima nilai Pancawaluya ke dalam proses penjaminan mutu, serta merumuskan pemahaman mutu pendidikan yang mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kepustakaan, menelaah literatur ilmiah nasional dan internasional serta dokumen regulasi pendidikan yang dianalisis melalui teknik analisis isi dan pemetaan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjaminan mutu pendidikan yang dilihat dari perspektif sosiologi pendidikan merupakan proses negosiasi makna dan konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi, kepemimpinan, dan kesepakatan nilai bersama warga sekolah, bukan semata-mata mekanisme administrative. Kelima nilai *Pancawaluya* dapat dipetakan secara koheren ke dalam siklus PPEPP yaitu *cageur* dan *bageur* pada tahap penetapan dan pelaksanaan, *bener* pada tahap evaluasi, *pinter* pada tahap pengendalian, dan *singer* pada tahap peningkatan berkelanjutan sehingga berfungsi sebagai basis sosial kultural yang memberi makna pada setiap tahapan mutu; serta pembentukan budaya mutu yang kontekstual masih menghadapi tantangan berupa persepsi guru yang memandang kebijakan kearifan lokal sebagai beban administratif tambahan. Hal ini dapat diatasi melalui kepemimpinan yang kuat dan pendekatan *whole-school approach*. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan Model Penjaminan Mutu Berbasis Kearifan Lokal (PMB-KL) yang menempatkan nilai lokal sebagai lapisan pemaknaan sosial kultural pada setiap tahapan PPEPP. Implikasi dari penelitian ini, bahwa satuan pendidikan perlu menerjemahkan nilai lokal ke dalam indikator dan praktik konkret pada setiap tahap penjaminan mutu didukung kepemimpinan sekolah yang menjembatani kebijakan formal dengan pemahaman informal warga sekolah sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan berbasis studi lapangan untuk menguji model ini secara empiris.

Kata Kunci: penjaminan mutu pendidikan, kearifan lokal, nilai Pancawaluya, sosiologi pendidikan, budaya mutu.

Abstract

Education quality assurance in Indonesia has a systematic mechanism through the cycle of Determination, Implementation, Evaluation, Control, and Improvement (PPEPP) but its implementation still tends to be technically administratively oriented and has not considered much of the socio-cultural dimension of the school, while the local wisdom of *Pancawaluya* (*cageur, bageur, bener, pinter, singer*) in West Java is still studied limited to the issue of character education and has not been specifically connected with the system Quality Assurance. This study aims to analyze the relationship between education quality assurance and Pancawaluya local wisdom in the perspective of educational sociology, identify the form of integration of the five Pancawaluya values into the quality assurance process, and formulate an understanding of education quality that considers social and cultural dimensions. The research uses a descriptive qualitative approach with a literature study design, reviewing national and international scientific literature and educational regulatory documents analyzed through content analysis techniques and thematic mapping. The results of the study show that education quality assurance seen from the perspective of educational sociology is a process of negotiation of meaning and social construction formed through interaction, leadership, and mutual value agreement among school residents, not solely an administrative mechanism. The five values of *Pancawaluya* can be mapped coherently into the PPEPP cycle namely *cageur and bageur* at the determination and implementation stage, *bener* at the evaluation stage, *pinter* at the control stage, and *singer* at the stage of continuous improvement so that it functions as a socio-cultural basis that gives meaning to each quality stage; as well as the formation of a contextual quality culture still faces challenges in the form of teachers' perceptions that view local wisdom policies as an additional administrative burden. This can be overcome through strong leadership and a whole-school approach. Based on these findings, this study proposes a Local Wisdom-Based Quality Assurance Model (PMB-KL) that places local values as a layer of socio-cultural meaning at each stage of PPEPP. The implication of this study is that education units need to translate local values into concrete indicators and practices at each stage of quality assurance supported by school leadership that bridges formal policies with informal understanding of school residents while opening up space for further research based on field studies to test this model empirically.

Keywords: quality assurance of education, local wisdom, *Pancawaluya* values, sociology of education, quality culture.

1. PENDAHULUAN

Mutu pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan karena kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian akademik peserta didik, tetapi juga menyangkut kualitas proses pembelajaran, kompetensi pendidik, tata kelola satuan pendidikan, lingkungan belajar, budaya sekolah, serta kemampuan lembaga pendidikan dalam merespon perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Secara regulatif kewajiban satuan pendidikan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu telah diamanatkan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian dioperasionalkan secara khusus bagi jenjang dasar dan menengah melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Dalam konteks tersebut, penjaminan mutu pendidikan menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung secara terencana, terukur, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkelanjutan. PPEPP dalam penelitian ini merujuk pada kerangka konseptual yang secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 yaitu siklus manajerial Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu pendidikan yang pada mulanya bersifat administratif-regulatif. Kerangka tersebut diadaptasi dalam penelitian ini bukan sekadar sebagai prosedur administratif satuan pendidikan, melainkan direinterpretasi sebagai siklus sosial yang pada setiap tahapannya dapat diisi oleh proses interaksi, kepemimpinan, dan kesepakatan nilai warga sekolah, sehingga menjadi pijakan bagi upaya mengintegrasikan nilai kearifan lokal *Pancawaluya* ke dalam praktik penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan. Penelitian mengenai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menunjukkan bahwa penjaminan mutu dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan penilaian mandiri, pembentukan tim mutu, analisis hasil evaluasi, pelaksanaan peningkatan mutu, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan. Penerapan siklus tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan standar pendidikan, tetapi juga berdampak pada inovasi pembelajaran, keberhasilan peserta didik, kepuasan pemangku kepentingan, dan pencapaian standar nasional pendidikan (Arifianto & Abdullah, 2022). Dengan demikian penjaminan mutu pada hakikatnya tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas administratif melainkan sebagai proses kelembagaan yang melibatkan berbagai aktor dan membentuk budaya mutu dalam lingkungan pendidikan.

Persoalan mutu pendidikan menjadi semakin kompleks karena kualitas pendidikan tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui pencapaian indikator kuantitatif. Sekolah merupakan institusi sosial yang berada dalam lingkungan masyarakat tertentu dan secara terus-menerus berinteraksi dengan nilai, norma, kebiasaan, struktur sosial, serta kebudayaan yang berkembang di sekitarnya. Oleh sebab itu, standar mutu yang diterapkan secara seragam belum tentu sepenuhnya mampu menggambarkan kebutuhan sosial dan karakteristik budaya masyarakat tempat satuan pendidikan berada. Penjaminan mutu yang hanya berorientasi pada pemenuhan standar berpotensi menjadikan proses peningkatan mutu sebagai aktivitas administratif, sementara dimensi sosial dan kultural yang sesungguhnya memengaruhi perilaku warga sekolah kurang memperoleh perhatian.

Padahal keberhasilan penjaminan mutu sangat bergantung pada keterlibatan organisasi, kepemimpinan, sumber daya manusia, serta kemampuan seluruh warga lembaga pendidikan untuk membangun budaya mutu secara bersama-sama. Penelitian mengenai implementasi SPMI menunjukkan bahwa keberhasilan penjaminan mutu membutuhkan sinergi antar unit dan keterlibatan berbagai unsur organisasi agar peningkatan mutu dapat berlangsung secara berkelanjutan (Ramadhan et al., 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menghadirkan pendekatan penjaminan mutu yang tidak hanya berorientasi pada standar formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, sekolah bukan sekadar tempat berlangsungnya proses transfer pengetahuan, melainkan institusi sosial yang berfungsi membentuk perilaku, menanamkan nilai, mereproduksi norma, dan mempersiapkan peserta didik agar mampu menjalankan perannya dalam masyarakat (Bourdieu & Passeron, 1977). Mutu pendidikan dapat dipahami secara lebih luas sebagai kemampuan lembaga pendidikan dalam menghasilkan individu yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan beradaptasi, berinteraksi secara sehat, memiliki integritas, serta mampu menjalankan tanggung jawab sosialnya. Perspektif tersebut membuka ruang bagi kearifan lokal untuk ditempatkan sebagai salah satu basis dalam membangun budaya mutu pendidikan karena nilai-nilai lokal pada dasarnya merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat yang mengandung pedoman mengenai perilaku ideal, hubungan antarmanusia, dan kehidupan bersama.

Salah satu bentuk kearifan lokal yang memiliki relevansi kuat dengan tujuan tersebut berada di daerah Jawa Barat yaitu *Pancawaluya*. *Pancawaluya* merupakan filosofi pendidikan berbasis nilai budaya Sunda yang memuat lima nilai utama yaitu *cageur, bageur, bener, pinter*, dan *singer*. Nilai *cageur* merepresentasikan manusia yang sehat secara jasmani dan rohani, *bageur* menggambarkan perilaku baik dan berakhlak, *bener* berkaitan dengan kejujuran, kebenaran, dan tanggung jawab, *pinter* menunjukkan kecerdasan dan kemampuan berpikir, sedangkan *singer* menekankan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Kajian sistematis mengenai *Pancawaluya* menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut semakin banyak digunakan dalam penelitian pendidikan terutama dalam konteks pendidikan karakter dan kearifan lokal Sunda (Fazriyah et al., 2026). Hal tersebut menunjukkan bahwa *Pancawaluya* memiliki potensi sebagai kerangka nilai yang relevan dengan kebutuhan pendidikan kontemporer karena menghubungkan dimensi kesehatan, moralitas, intelektualitas, tanggung jawab, kreativitas, dan kemampuan adaptasi dalam satu kesatuan konsep manusia yang ideal. Relevansi *Pancawaluya* dalam pendidikan juga telah ditunjukkan oleh penelitian empiris. Penelitian mengenai pendidikan karakter *Pancawaluya* menunjukkan bahwa nilai *cageur, bageur, bener, pinter*, dan *singer* dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pendidikan dan diposisikan sebagai pendekatan untuk membangun karakter peserta didik yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya Jawa Barat (Sofyan et al., 2026).

Penelitian lain mengenai implementasi *Pancawaluya* di sekolah menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut mulai diintegrasikan dalam pembelajaran dan budaya sekolah, tetapi dalam praktiknya masih terdapat kendala karena sebagian guru memandang kebijakan *Pancawaluya* sebagai tambahan beban administratif sehingga integrasinya ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler belum sepenuhnya optimal

(Rahman et al., 2026). Fakta tersebut menjadi penting karena memperlihatkan bahwa keberadaan kebijakan berbasis kearifan lokal tidak secara otomatis menghasilkan perubahan budaya pendidikan. Nilai lokal membutuhkan proses internalisasi, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan penguatan agar benar-benar menjadi bagian dari kehidupan institusi pendidikan. Permasalahan tersebut dapat dilihat sebagai suatu kasus yang menunjukkan adanya jarak antara kebijakan pendidikan berbasis kearifan lokal dengan praktik kelembagaan di sekolah. *Pancawaluya* telah memperoleh posisi penting sebagai identitas pendidikan karakter di Jawa Barat, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman guru, integrasi program, serta pembentukan budaya sekolah. Pada saat yang sama sistem penjaminan mutu pendidikan telah memiliki mekanisme yang relatif sistematis melalui proses Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan mutu (PPEPP). Namun mekanisme tersebut pada umumnya masih lebih banyak diarahkan pada pemenuhan standar, evaluasi kinerja, serta pencapaian indikator mutu. Penelitian mengenai SPMI menunjukkan bahwa pelaksanaan siklus penjaminan mutu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mengintegrasikan sistem tersebut ke dalam keseluruhan tata kelola organisasi (Mulyasa & Aryani, 2022).

Masalah yang selanjutnya bukan hanya bagaimana sekolah memenuhi standar mutu, tetapi bagaimana standar dan proses peningkatan mutu tersebut memiliki makna bagi kehidupan sosial warga sekolah serta sesuai dengan nilai budaya masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan dalam penelitian terdahulu. Kajian mengenai penjaminan mutu pendidikan umumnya berfokus pada efektivitas implementasi SPMI, evaluasi, audit mutu, pemenuhan standar, tata kelola, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan (Darmaji et al., 2020; Gusti & Masduki, 2022). Sebaliknya, kajian mengenai *Pancawaluya* masih didominasi oleh pembahasan mengenai pendidikan karakter, pembelajaran, etnopedagogi, budaya Sunda, dan pembentukan perilaku peserta didik. *Systematic Literature Review* mengenai *Pancawaluya* bahkan menunjukkan bahwa dari 18 artikel yang dikaji pada periode 2018-2025, tema pendidikan karakter merupakan tema paling dominan yaitu sebesar 44%, disusul etnopedagogi dan budaya Sunda sebesar 33%, sastra dan seni Sunda sebesar 17%, serta psikologi dan konseling sebesar 6% (Fazriyah et al., 2026). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penelitian mengenai *Pancawaluya* masih memiliki ruang pengembangan ke dalam bidang lain khususnya manajemen dan penjaminan mutu pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terdahulu telah menjelaskan apa nilai *Pancawaluya* dan bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam pendidikan karakter, tetapi belum secara memadai menjelaskan bagaimana *Pancawaluya* dapat menjadi basis sosial kultural dalam sistem penjaminan mutu pendidikan.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin jelas apabila penjaminan mutu dilihat dari perspektif sosiologi pendidikan. Sistem mutu tidak hanya bekerja melalui dokumen, standar, instrumen evaluasi, dan prosedur formal, tetapi juga melalui proses sosial berupa pembentukan kebiasaan, norma, relasi, kepemimpinan, partisipasi, serta kesepakatan bersama mengenai kualitas yang dianggap penting oleh komunitas pendidikan. Kajian mutakhir mengenai budaya sekolah menegaskan bahwa budaya sekolah terbentuk dari sumber formal, informal, maupun lingkungan yang saling beririsan dan tidak semata-mata bersifat *top-down* (Cucchiara et al., 2025), sementara kajian mengenai mutu pendidikan tinggi juga mulai bergeser ke arah pengakuan terhadap dimensi sosial dan pengalaman pemangku kepentingan, bukan sekadar indikator teknis (Bernardo et al., 2024). Budaya

mutu sesungguhnya merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi antarwarga sekolah. Dalam kerangka tersebut kearifan lokal dapat berfungsi sebagai sumber nilai yang memberikan makna terhadap proses penjaminan mutu. *Pancawaluya* tidak lagi diposisikan hanya sebagai materi pembentukan karakter peserta didik, tetapi dapat dipahami sebagai kerangka nilai yang memengaruhi cara sekolah mendefinisikan kualitas, mengembangkan budaya organisasi, membangun hubungan sosial, melaksanakan evaluasi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Agar konsep-konsep tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, penelitian ini menyusun satu kerangka integratif dari Teori reproduksi kultural *Bourdieu dan Passeron* (1977) yang digunakan sebagai lensa makro-sosiologis untuk memahami sekolah sebagai arena reproduksi nilai dan modal budaya; konsep *school culture* dan *whole-school approach* (Cucchiara et al., 2025) menjelaskan bagaimana nilai tersebut hidup secara meso-institusional melalui kebiasaan, relasi, dan kepemimpinan warga sekolah; sedangkan gagasan *quality culture* (Bernardo et al., 2024) menempatkan mutu sebagai konstruksi sosial yang disepakati bersama, bukan semata pemenuhan standar teknis. Ketiga lensa tersebut selanjutnya dipertemukan dengan siklus PPEPP sebagai kerangka operasional penjaminan mutu dan kearifan lokal *Pancawaluya* sebagai muatan nilai lokal yang mengisi setiap tahapan siklus tersebut, sehingga *Pancawaluya* tidak diperlakukan sebagai variabel tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sumber makna yang menyatu dengan proses sosial pada setiap tahap PPEPP. Kerangka integratif inilah yang menjadi dasar bagi perumusan Model Penjaminan Mutu Berbasis Kearifan Lokal (PMB-KL) yang diusulkan pada bagian akhir artikel ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian nilai kearifan lokal Pancawaluya ke dalam penjaminan mutu pendidikan melalui perspektif sosiologi pendidikan. Kajian Pancawaluya sebelumnya lebih banyak berfokus pada pendidikan karakter, etnopedagogi, dan budaya Sunda, sementara keterkaitannya dengan penjaminan mutu pendidikan masih terbatas. Penelitian ini menawarkan pemaknaan Pancawaluya sebagai basis sosial-kultural dalam siklus PPEPP, bukan sekadar sebagai nilai karakter dengan memetakan cageur, bageur, bener, pinter, dan singer pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu. Pendekatan ini menghasilkan kerangka konseptual Model Penjaminan Mutu Berbasis Kearifan Lokal (PMB-KL) yang menempatkan nilai lokal sebagai lapisan pemaknaan dalam budaya mutu sekolah. Perspektif ini menjadi relevan karena penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan berbasis Pancawaluya telah mulai diarahkan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta integrasi nilai ke dalam budaya sekolah (Cahyono et al., 2025), meski kajian tersebut masih berfokus pada manajemen pendidikan karakter dan belum secara khusus mengaitkannya dengan keseluruhan mekanisme penjaminan mutu pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian berjudul "**Analisis Penjaminan Mutu Pendidikan Berbasis Nilai Kearifan Lokal *Pancawaluya* dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan"** menjadi penting dilakukan untuk mengisi ruang penelitian tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana penjaminan mutu pendidikan dapat dikonstruksi tidak hanya sebagai mekanisme administratif untuk memenuhi standar, tetapi sebagai proses sosial yang berakar pada nilai dan budaya masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian diarahkan pada tiga pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana

penjaminan mutu pendidikan dapat dianalisis melalui perspektif sosiologi pendidikan; (2) bagaimana nilai *cageur, bageur, bener, pinter*, dan *singer* dapat diintegrasikan ke dalam proses penjaminan mutu; serta (3) bagaimana integrasi tersebut dapat membentuk budaya mutu yang kontekstual pada satuan pendidikan. Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara penjaminan mutu pendidikan dan kearifan lokal *Pancawaluya*, mengidentifikasi bentuk integrasi kelima nilai *Pancawaluya* dalam budaya dan proses penjaminan mutu, serta merumuskan pemahaman mengenai penjaminan mutu pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian standar formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, karakter, dan kebutuhan masyarakat lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kepustakaan (*library research*/studi pustaka) yaitu desain penelitian yang mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen resmi tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung (Sugiyono, 2021; Zed, 2025). Secara lebih spesifik, desain ini tergolong sebagai *integrative literature review* karena bertujuan untuk mensintesis temuan dari klaster literatur yang berbeda yaitu penjaminan mutu pendidikan, kearifan lokal, dan sosiologi pendidikan untuk membangun kerangka konseptual baru yang mengintegrasikan ketiganya. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat konseptual analitis yaitu mengonstruksi kerangka pemahaman baru mengenai keterkaitan antara penjaminan mutu pendidikan, kearifan lokal *Pancawaluya*, dan perspektif sosiologi pendidikan, bukan menguji hubungan sebab-akibat secara empiris di lapangan. Jenis penelitian tergolong deskriptif interpretatif karena menekankan pemaknaan dan interpretasi terhadap temuan-temuan penelitian terdahulu, sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman makna di balik fenomena ketimbang generalisasi statistik (Sugiyono, 2021)

Subjek dalam penelitian ini bukan berupa responden manusia, melainkan dokumen dan sumber literatur ilmiah yang relevan dengan tiga klaster tema yaitu: (1) penjaminan mutu pendidikan dan SPMI; (2) kearifan lokal, pendidikan karakter, dan *Pancawaluya*; serta (3) sosiologi pendidikan dan budaya sekolah (*school culture*). Sumber data terdiri atas artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi, buku metodologi dan teori, serta dokumen regulasi kebijakan pendidikan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Rentang tahun terbitan diprioritaskan pada sepuluh tahun terakhir (2016-2026) untuk menjamin kemutakhiran data dengan pengecualian pada sumber teoretis klasik yang tetap relevan sebagai landasan konsep seperti teori reproduksi kultural Bourdieu dan Passeron (1990).

Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis pada basis data akademik antara lain Google Scholar, SINTA, Garuda, dan repositori jurnal internasional, menggunakan kata kunci “penjaminan mutu pendidikan”, “SPMI”, “kearifan lokal”, “*Pancawaluya*”, “sosiologi pendidikan”, dan “budaya sekolah/*school culture*”. Kriteria inklusi yang digunakan meliputi:

(1) artikel dipublikasikan pada jurnal ilmiah terindeks atau terakreditasi; (2) topik relevan secara langsung dengan penjaminan mutu pendidikan, kearifan lokal, atau sosiologi pendidikan; dan (3) memiliki abstrak serta teks yang dapat ditelusuri secara daring. Kriteria eksklusi meliputi artikel non-ilmiah atau opini populer tanpa telaah akademik, duplikasi terbitan, serta artikel yang tidak memiliki keterkaitan tematik yang jelas dengan fokus penelitian.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan mengkategorikan temuan setiap sumber ke dalam tiga klaster tema. Penyajian data dilakukan melalui pemetaan tematik yang menghubungkan nilai-nilai *Pancawaluya* dengan tahapan siklus penjaminan mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022. Suatu tema atau kategori dalam penelitian ini hanya ditetapkan apabila didukung oleh kesesuaian temuan dari lebih dari satu jenis sumber tertulis, sehingga konsistensi interpretasi dapat dipertahankan sebelum ditarik simpulan analitis yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL

Hasil penelitian disajikan dalam dua bagian. Bagian pertama melaporkan proses pengumpulan, seleksi, dan pengodean data yang membentuk korpus literatur penelitian. Bagian kedua memaparkan temuan analisis isi terhadap korpus tersebut, yang meliputi karakteristik literatur pada setiap klaster tema dan pemetaan nilai *Pancawaluya* ke dalam siklus PPEPP.

3.1.1 Proses Pengumpulan dan Seleksi Data

Pengumpulan data dilaksanakan pada periode Juli hingga September 2026 melalui penelusuran daring pada Google Scholar, SINTA, Garuda, dan repositori jurnal internasional. Keempat kanal tersebut berperan berbeda. Google Scholar menjadi pintu masuk lintas penerbit untuk menjaring artikel berbahasa Indonesia maupun Inggris. Garuda digunakan untuk menjangkau artikel pada jurnal nasional, sedangkan SINTA digunakan untuk memastikan bahwa jurnal nasional yang memuat artikel tersebut berstatus terakreditasi. Repositori jurnal internasional digunakan untuk menjangkau kajian mengenai budaya sekolah dan mutu pendidikan yang terbit di jurnal bereputasi. Kata kunci yang dipakai adalah “penjaminan mutu pendidikan”, “SPMI”, “kearifan lokal”, “*Pancawaluya*”, “sosiologi pendidikan”, dan “budaya sekolah/*school culture*”, yang dijalankan secara tunggal maupun dikombinasikan. Dokumen regulasi dan buku metodologi tidak diperoleh melalui prosedur penelusuran tersebut, melainkan dihimpun secara purposif karena berfungsi sebagai landasan normatif dan prosedural penelitian. Hal yang sama berlaku pada karya klasik Bourdieu dan Passeron (1977) yang dirujuk sebagai landasan teori.

Penelusuran awal mengidentifikasi 68 artikel. Pada tahap penyaringan judul dan abstrak, artikel yang terbit ganda pada lebih dari satu kanal, artikel yang bersifat opini

atau non-ilmiah, serta artikel yang tidak memiliki keterkaitan tematik yang jelas dengan penjaminan mutu, kearifan lokal, atau sosiologi pendidikan dikeluarkan. Dengan demikian, 27 artikel tereliminasi dan 41 artikel dilanjutkan ke tahap teks lengkap. Pada tahap ini setiap artikel dibaca utuh dan dinilai berdasarkan kesesuaian topik dengan salah satu klaster tema, kedalaman pembahasan, ketersediaan teks lengkap, dan kesesuaian rentang tahun terbit. Artikel yang hanya menyinggung topik penelitian secara sepintas, tidak tersedia dalam bentuk teks lengkap, terbit di luar rentang 2016-2026, atau fokus kajiannya bergeser dari ketiga klaster tema dikeluarkan. Pada tahap ini 21 artikel tereliminasi sehingga 20 artikel jurnal ditetapkan sebagai korpus utama. Korpus tersebut dilengkapi enam sumber non-artikel, yaitu satu buku teori klasik, dua buku metodologi, dan tiga dokumen regulasi, sehingga jumlah sumber yang akhirnya dianalisis adalah 26. Alur seleksi ini diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Alur Penelusuran dan Seleksi Sumber

Tahap	Kegiatan Utama	Artikel Tereliminasi	Sumber Tersisa
Identifikasi	Penelusuran pada Google Scholar, SINTA, Garuda, dan repositori jurnal internasional (Januari–Maret 2026)	–	68 artikel
Penyaringan judul dan abstrak	Penghapusan duplikasi dan penilaian relevansi tematik berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi	27 artikel	41 artikel
Penilaian teks lengkap	Pembacaan utuh untuk menilai kesesuaian topik, kedalaman pembahasan, ketersediaan teks lengkap, dan rentang tahun terbit	21 artikel	20 artikel
Penambahan sumber non-artikel	Satu buku teori klasik, dua buku metodologi, dan tiga dokumen regulasi yang dihimpun secara purposif	–	6 sumber
Korpus akhir	**Sumber yang dikodekan dan dianalisis**	**–**	**26 sumber**

Penelusuran dan penyaringan dilakukan oleh penulis pertama. Artikel yang kelayakannya meragukan, misalnya karena pembahasan topiknya bersifat sepintas atau terbitannya berada di batas rentang tahun, dibahas bersama penulis kedua sebelum diputuskan untuk dimasukkan atau dikeluarkan.

3.1.2 Proses Coding dan Penetapan Klaster

Proses *coding* dilakukan secara manual dengan teknik analisis isi terhadap 26 sumber terpilih melalui empat langkah. Pertama, penulis pertama membaca keseluruhan teks setiap sumber untuk memahami tujuan, konteks, dan temuan utamanya. Kedua, unit informasi yang bermakna seperti konsep kunci, temuan, konteks satuan pendidikan, dan tantangan implementasi, ditandai dan dicatat pada matriks pengodean per sumber. Ketiga, kode-kode tersebut dikelompokkan berdasarkan kesamaan fokus menjadi klaster tema. Keempat, kode yang berkaitan dengan makna kelima nilai *Pancawaluya* dipertemukan dengan tuntutan fungsional setiap tahap PPEPP untuk menyusun pemetaan konseptual pada Tabel 3. Keempat langkah ini

bersesuaian dengan tahap reduksi dan penyajian data dalam analisis isi sebagaimana dijelaskan pada bagian metode.

Penetapan sebuah sumber ke dalam klaster tertentu didasarkan pada definisi operasional berikut. Sumber masuk klaster penjaminan mutu pendidikan/SPMI apabila tujuan dan temuan utamanya membahas siklus, implementasi, regulasi, atau tata kelola penjaminan mutu. Sumber masuk klaster kearifan lokal, pendidikan karakter, dan *Pancawaluya* apabila tujuan dan temuan utamanya membahas nilai budaya lokal, pendidikan karakter, atau integrasi kearifan lokal ke dalam pembelajaran dan budaya sekolah. Sumber masuk klaster sosiologi pendidikan dan budaya sekolah apabila kontribusi utamanya berupa teori atau konsep mengenai sekolah sebagai institusi sosial, pembentukan budaya sekolah, atau dimensi sosial budaya dalam mutu pendidikan. Penempatan tidak ditentukan oleh kata kunci pada judul semata, melainkan oleh fokus utama yang tampak pada tujuan dan temuan sumber. Apabila sebuah sumber menyentuh lebih dari satu klaster, sumber tersebut ditempatkan pada klaster yang paling dominan dan tidak dihitung ganda, sedangkan kontribusi sekundernya tetap dapat digunakan dalam pembahasan. Sebagai contoh, kajian (Cahyono et al., 2025) menyentuh unsur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, tetapi ditempatkan pada klaster kearifan lokal dan pendidikan karakter karena fokus utamanya adalah manajemen pendidikan karakter *Pancawaluya*. Sementara itu, editorial mengenai mutu pendidikan tinggi ditempatkan pada klaster sosiologi pendidikan karena kontribusi utamanya terletak pada pergeseran perhatian ke dimensi sosial mutu.

Coding dilakukan oleh penulis pertama, kemudian hasil pengelompokan diperiksa ulang oleh penulis kedua. Perbedaan penafsiran terutama pada sumber yang menyentuh lebih dari satu klaster, didiskusikan dengan kembali membaca tujuan dan temuan sumber tersebut hingga dicapai kesepakatan mengenai klaster yang paling dominan. Konsistensi interpretasi dijaga melalui tiga langkah yaitu penggunaan definisi operasional klaster yang sama sepanjang proses, pemeriksaan ulang oleh penulis kedua, dan pembandingan silang temuan antarjenis sumber (jurnal nasional, jurnal internasional, dan dokumen regulasi) sebelum suatu temuan dipakai sebagai dasar pemetaan. Karena jumlah sumber terbatas dan pengodean bersifat interpretatif, kesepakatan dicapai melalui konsensus dan tidak dihitung dengan koefisien kesepakatan antarpengode. Pengodean awal dilakukan oleh satu orang sehingga kemungkinan bias penafsiran tetap ada, dan hal ini menjadi salah satu alasan mengapa hasil pemetaan dalam penelitian ini diposisikan sebagai temuan konseptual. Hasil pengelompokan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Sumber Literatur

Klaster Tema	Sumber	Jumlah (Jenis)
Penjaminan Mutu Pendidikan / SPMI	Arifianto & Abdullah (2022); Darmaji dkk. (2020); Gusti & Masduki (2022); Mulyasa & Aryani (2022); Ramadhan dkk. (2025)	5 (artikel jurnal)

Klaster Tema	Sumber	Jumlah (Jenis)
Kearifan Lokal, Pendidikan Karakter, dan *Pancawaluya*	Aisyah & Suwandi (2025); Cahyono dkk. (2025); Farhaeni & Martini (2023); Fazriyah dkk. (2026); Fitriasari dkk. (2023); Hasan dkk. (2024); Istiningsih & Dharma (2021); Kurniawati dkk. (2022); Rahman dkk. (2026); Shufa (2018); Sofyan dkk. (2026); Wagiran (2018)	12 (artikel jurnal)
Sosiologi Pendidikan dan Budaya Sekolah	Bernardo dkk. (2024); Bourdieu & Passeron (1977); Cucchiara dkk. (2025); Riquelme dkk. (2024)	4 (3 artikel jurnal, 1 buku)
Dokumen Pendukung (Metodologi dan Regulasi)	Sugiyono (2021); Zed (2025); UU No. 20/2003; PP No. 57/2021; Permendikbudristek No. 9/2022	5 (2 buku, 3 regulasi)
Total		**26 sumber**

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 21 sumber tematik, klaster kearifan lokal, pendidikan karakter, dan *Pancawaluya* merupakan yang terbesar (12 sumber), disusul klaster penjaminan mutu pendidikan/SPMI (5 sumber) dan klaster sosiologi pendidikan dan budaya sekolah (4 sumber). Literatur mengenai penjaminan mutu sebagian besar berfokus pada implementasi SPMI di satuan pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, sedangkan literatur mengenai *Pancawaluya* sebagian besar masih berpusat pada isu pendidikan karakter dan etnopedagogi. Literatur bertema sosiologi pendidikan dan budaya sekolah relatif lebih terbatas jumlahnya, namun memberikan landasan konseptual penting untuk menjembatani kedua klaster sebelumnya. Sebaran ini konsisten dengan kesenjangan yang dirumuskan pada bagian pendahuluan, meskipun korpus yang terbatas ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh literatur yang tersedia.

3.1.3 Temuan Telaah Literatur mengenai Penjaminan Mutu dan *Pancawaluya*

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa penjaminan mutu pendidikan di Indonesia telah memiliki mekanisme yang relatif sistematis melalui siklus PPEPP yang dilaksanakan melalui penilaian mandiri, pembentukan tim penjaminan mutu, analisis hasil evaluasi, pelaksanaan peningkatan mutu, monitoring, serta evaluasi berkelanjutan (Arifianto & Abdullah, 2022; Darmaji et al., 2020). Keberhasilan pelaksanaan SPMI ditemukan sangat bergantung pada sinergi antarunit organisasi, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta keterlibatan seluruh warga sekolah melalui pendekatan *whole-school approach* (Mulyasa & Aryani, 2022; Ramadhan et al., 2025). Namun demikian, sebagian besar literatur juga menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMI pada praktiknya masih lebih banyak diarahkan pada pemenuhan standar teknis dan indikator kinerja formal (Gusti & Masduki, 2022), sehingga dimensi sosial dan kultural yang menyertai proses tersebut belum banyak menjadi perhatian utama.

Hasil telaah literatur mengenai *Pancawaluya* menunjukkan bahwa kelima nilainya yaitu *cageur, bageur, bener, pinter*, dan *singer* semakin banyak diadopsi dalam penelitian pendidikan karakter di Jawa Barat (Fazriyah et al., 2026; Sofyan et al., 2026). Implementasi *Pancawaluya* di sekolah pada umumnya dilakukan melalui

pengintegrasian nilai ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta melalui pendampingan dan pengelolaan yang terencana (Cahyono et al., 2025; Rahman et al., 2026). Meskipun demikian, hasil kajian juga secara konsisten menunjukkan adanya tantangan implementasi, terutama karena sebagian guru memandang kebijakan berbasis kearifan lokal sebagai tambahan beban administratif, sehingga integrasinya ke dalam budaya sekolah belum sepenuhnya optimal (Rahman et al., 2026). Pola serupa juga ditemukan pada kajian mengenai integrasi kearifan lokal lain di berbagai daerah di Indonesia yang menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi nilai lokal ke dalam kurikulum dan budaya sekolah sangat dipengaruhi oleh dukungan kepemimpinan dan pemahaman warga sekolah (Fitriasari et al., 2023; Hasan et al., 2024)

3.1.4 Pemetaan Nilai *Pancawaluya* ke dalam Siklus PPEPP

Berdasarkan sintesis temuan pada subbagian 3.1.2 dan 3.1.3, penelitian ini menyusun pemetaan konseptual antara kelima nilai *Pancawaluya* dengan tahapan siklus penjaminan mutu (PPEPP) sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Pemetaan ini merupakan hasil analisis isi terhadap literatur yang ditelaah dan menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana nilai-nilai tersebut secara konseptual dapat memberi makna sosial kultural pada setiap tahapan penjaminan mutu.

Tabel 3. Pemetaan Nilai Pancawaluya dalam Siklus Penjaminan Mutu

Nilai *Pancawaluya*	Makna Filosofis	Tahapan PPEPP yang Relevan	Kontribusi terhadap Budaya Mutu
Cageur	Sehat jasmani dan rohani	Penetapan standar	Dasar bagi lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan mendukung proses belajar
Bageur	Berperilaku baik dan berakhlak	Pelaksanaan (*whole-school approach*)	Landasan kualitas relasi sosial, kepedulian, dan solidaritas antarwarga sekolah
Bener	Jujur, benar, dan bertanggung jawab	Evaluasi	Dasar integritas, akuntabilitas, dan objektivitas dalam evaluasi diri sekolah
Pinter	Cerdas dan mampu berpikir	Pengendalian (berbasis data/rapor mutu)	Landasan literasi data dan pengambilan keputusan berbasis bukti
Singer	Terampil, kreatif, dan adaptif	Peningkatan berkelanjutan	Dasar inovasi, kreativitas, dan kemampuan sekolah beradaptasi terhadap perubahan

Pemetaan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa kelima nilai *Pancawaluya* tidak berdiri secara terpisah dari mekanisme penjaminan mutu yang telah ada, melainkan dapat diposisikan sebagai lapisan pemaknaan yang mengiringi setiap tahapan PPEPP. Nilai *cageur* dan *bageur* lebih relevan pada tahap penetapan standar dan pelaksanaan yang bersifat kolaboratif, nilai *bener* relevan pada tahap evaluasi yang menekankan objektivitas dan kejujuran, nilai *pinter* relevan pada tahap pengendalian yang berbasis data, sedangkan nilai *singer* relevan pada tahap peningkatan berkelanjutan yang menuntut kreativitas dan adaptasi.

Pemetaan pada Tabel 3 di atas bukan sekadar kesesuaian tematik antara nama nilai dan nama tahap, melainkan didasarkan pada tuntutan fungsional yang melekat pada setiap tahap dalam siklus PPEPP sehingga setiap pasangan nilai-tahap memiliki dasar teoritis tersendiri. Nilai *cageur* ditempatkan dominan pada tahap Penetapan karena tahap ini pada hakikatnya merupakan tahap peletakan fondasi mutu sebelum standar mutu yang lebih tinggi, baik akademik, sosial, maupun kelembagaan dapat dirumuskan secara bermakna, kebutuhan dasar warga sekolah berupa kesehatan jasmani dan rohani serta rasa aman perlu terlebih dahulu terpenuhi, sehingga standar yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan aspek tersebut berisiko menjadi target yang tercerabut dari kondisi riil peserta didik dan pendidik. Nilai *bageur* ditempatkan dominan pada tahap Pelaksanaan karena tahap ini menuntut kerja sama kolektif antarwarga sekolah melalui pendekatan *whole-school approach* yang secara teoritis hanya dapat berjalan apabila tersedia modal sosial berupa kepercayaan, kepedulian, dan relasi yang berakhlak baik di antara pihak-pihak yang terlibat karena tanpa perilaku baik sebagai perekat relasi sosial, dokumen rencana yang telah disusun pada tahap Penetapan berisiko tidak diterjemahkan menjadi tindakan kolektif yang konsisten. Pelaksanaan mutu pada dasarnya adalah proses sosial yang bergantung pada kesediaan warga sekolah untuk saling bekerja sama, bukan semata-mata proses administratif menjalankan prosedur. Nilai *bener* diposisikan dominan pada tahap Evaluasi karena validitas dan kebermaknaan hasil evaluasi secara epistemologis bertumpu pada kejujuran pelapor dan objektivitas penilai; data evaluasi yang dihasilkan tanpa kejujuran akan kehilangan nilai kebenarannya sekalipun prosedur evaluasi telah dijalankan secara formal sehingga kejujuran berfungsi sebagai prasyarat metodologis, bukan semata nilai moral tambahan bagi evaluasi diri sekolah yang sahih. Nilai *pinter* ditempatkan dominan pada tahap Pengendalian karena tahap ini menuntut kemampuan menafsirkan data mutu misalnya rapor pendidikan dan hasil evaluasi diri sekolah, untuk kemudian diterjemahkan menjadi keputusan perbaikan; kapasitas berpikir dan bernalar yang direpresentasikan nilai ini sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan berbasis bukti yang menjadi ciri utama tahap pengendalian mutu. Adapun nilai *singer* hanya ditempatkan pada tahap Peningkatan karena inovasi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi secara konseptual merupakan prasyarat khas bagi perbaikan berkelanjutan yang menuntut sekolah merespons temuan evaluasi dan pengendalian dengan solusi baru, sementara pada tahap-tahap PPEPP lainnya kebutuhan terhadap kreativitas relatif lebih kecil dibandingkan kebutuhan terhadap kesehatan, akhlak, kejujuran, atau kecermatan analitis. Dengan demikian, kelima pemasangan nilai dengan tahapan PPEPP tersebut memiliki dasar teoritis yang berbeda-beda namun saling melengkapi sementara sifat pemetaannya tetap bersifat dominan dan bukan eksklusif, artinya kelima nilai tetap dapat hadir pada tahapan lain,

tetapi salah satu nilai lebih menonjol relevansinya pada tahap tertentu sesuai tuntutan fungsional tahap tersebut. Interpretasi lebih lanjut mengenai makna sosiologis dari pemetaan ini disajikan pada bagian pembahasan.

3.2 PEMBAHASAN

3.2.1 Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan

Temuan pada bagian hasil menunjukkan bahwa keberhasilan SPMI sangat bergantung pada sinergi organisasi dan keterlibatan warga sekolah (Mulyasa & Aryani, 2022; Ramadhan et al., 2025). Kondisi yang sesungguhnya bersifat sosiologis, bukan semata-mata teknis-administratif. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, sekolah dipahami sebagai institusi sosial yang mereproduksi nilai, norma, dan struktur sosial melalui interaksi sehari-hari antaraktor di dalamnya (Bourdieu & Passeron, 1977). Teori reproduksi kultural Bourdieu (1977) menjelaskan bahwa sistem pendidikan cenderung mewariskan dan menilai tinggi modal budaya yang telah dimiliki kelompok tertentu sehingga standar yang tampak netral secara formal sesungguhnya dapat dimaknai dan dijalankan secara berbeda oleh aktor-aktor dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda pula. Implikasinya terhadap penjaminan mutu adalah bahwa dokumen standar, instrumen evaluasi, dan prosedur SPMI tidak serta-merta menghasilkan pemaknaan dan pelaksanaan yang seragam di setiap sekolah karena keberterimaan dan internalisasinya sangat dipengaruhi oleh modal sosial budaya yang dimiliki warga sekolah.

Kajian mutakhir mengenai budaya sekolah memperkuat argumen tersebut dengan menegaskan bahwa budaya sekolah terbentuk dari sumber formal, informal, dan lingkungan yang saling beririsan, serta bersifat emergent dan situasional bukan semata-mata *top-down* (Cucchiara et al., 2025). Dengan kata lain kebijakan mutu yang ditetapkan secara formal oleh pemerintah atau pimpinan sekolah baru akan efektif membentuk budaya mutu apabila selaras dengan makna, praktik, dan interaksi informal yang berlangsung di antara warga sekolah. Argumen ini sejalan dengan pergeseran kajian mutu pendidikan tinggi yang mulai mengakui pentingnya dimensi sosial dan pengalaman pemangku kepentingan tidak semata-mata indikator teknis (Bernardo et al., 2024) serta kajian mengenai peran budaya dalam dinamika emosional proses pendidikan yang menegaskan bahwa budaya turut membentuk bagaimana warga sekolah merespon dan memaknai tuntutan institusional termasuk tuntutan mutu (Riquelme et al., 2024). Dengan demikian jawaban atas rumusan masalah pertama mengindikasikan bahwa penjaminan mutu pendidikan dilihat dari perspektif sosiologi pendidikan dapat dipahami sebagai proses negosiasi makna yang berlangsung terus-menerus di antara kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat, dan tidak semata-mata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan secara administratif, meskipun pemaknaan ini masih bersifat interpretatif berdasarkan telaah literatur dan perlu dikonfirmasi lebih lanjut melalui data lapangan.

3.2.2 Integrasi Nilai *Cageur, Bageur, Bener, Pinter,* dan *Singer* ke dalam Proses Penjaminan Mutu

Rumusan masalah kedua penelitian ini dijawab melalui pemetaan pada Tabel 2 yang diinterpretasikan lebih lanjut berikut ini. Nilai *cageur* yang merepresentasikan kesehatan jasmani dan rohani dapat diintegrasikan pada tahap penetapan standar melalui perumusan indikator mutu yang memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan psikologis warga sekolah, sejalan dengan temuan bahwa pembelajaran berbasis kearifan lokal memerlukan kerangka konseptual yang memperhatikan konteks lingkungan belajar peserta didik (Shufa, 2018). Nilai *bageur* yang menekankan akhlak dan perilaku baik relevan dengan tahap pelaksanaan yang bersifat kolaboratif atau *whole-school approach* karena kualitas relasi sosial dan kepedulian antar warga sekolah menjadi prasyarat bagi terlaksananya program mutu secara partisipatif sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian mengenai penguatan pendidikan karakter melalui budaya kelas (Kurniawati et al., 2022) dan integrasi nilai karakter lokal ke dalam profil pelajar Pancasila (Istiningsih & Dharma, 2021).

Nilai *bener* yang bermakna kejujuran, kebenaran, dan tanggung jawab secara konseptual paling relevan diintegrasikan pada tahap evaluasi dalam siklus PPEPP karena objektivitas dan akuntabilitas merupakan prasyarat bagi evaluasi diri sekolah yang bermakna, bukan sekadar formalitas administratif. Nilai *pinter* yang merepresentasikan kecerdasan dan kemampuan berpikir relevan pada tahap pengendalian mutu berbasis data, misalnya melalui pemanfaatan rapor pendidikan dan hasil evaluasi diri sekolah sebagai dasar pengambilan keputusan, sejalan dengan pentingnya literasi dan pemahaman berbasis pengetahuan dalam pendidikan nilai budaya (Farhaeni & Martini, 2023). Adapun nilai *singer* yang menekankan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi relevan dengan tahap peningkatan mutu berkelanjutan karena inovasi pembelajaran dan program sekolah senantiasa dituntut untuk merespon perubahan sosial sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai praktik integrasi kearifan lokal ke dalam kurikulum operasional satuan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia termasuk melalui kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya (Aisyah & Suwandi, 2025) dan inovasi kurikulum berbasis nilai lokal di luar Jawa Barat (Hasan et al., 2024). Kesamaan pola pada berbagai konteks budaya lokal yang berbeda ini memperkuat argumen bahwa integrasi nilai lokal ke dalam manajemen dan penjaminan mutu pendidikan merupakan fenomena yang dapat digeneralisasikan secara konseptual sekalipun label dan konten spesifik nilainya berbeda antar daerah misalnya *Pancawaluya* di Jawa Barat dan *Hamemayu Hayuning Bawana* di Yogyakarta (Wagiran, 2018).

Klaim generalisasi tersebut tetap bersifat tentatif dan memerlukan pengujian lebih lanjut melalui studi komparatif berbasis data lapangan pada berbagai konteks kearifan lokal, mengingat penelitian ini murni bersifat kajian kepustakaan dan belum melibatkan verifikasi empiris di satuan pendidikan. Kelima pemasangan nilai dengan tahapan PPEPP tersebut memiliki dasar teoritis yang berbeda-beda, bukan sekadar kesesuaian tematik. Nilai *cageur* ditempatkan dominan pada tahap Penetapan karena secara teoritis penetapan standar mutu merupakan tahap peletakan fondasi, sehingga sejalan dengan gagasan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan keselamatan menjadi prasyarat sebelum tujuan mutu yang lebih tinggi dapat dirumuskan secara bermakna. Nilai *bageur* ditempatkan dominan pada tahap

Pelaksanaan karena implementasi mutu yang bersifat kolaboratif melalui *whole-school approach* secara teoritis hanya dapat berlangsung apabila tersedia modal sosial berupa kepercayaan, kepedulian, dan relasi yang berakhlak baik di antara warga sekolah, sehingga perilaku baik berfungsi sebagai prasyarat relasional bagi terlaksananya kerja sama kolektif, bukan sekadar pelengkap etika di luar mekanisme mutu. Nilai *bener* diposisikan terutama pada tahap Evaluasi karena validitas dan kebermaknaan hasil evaluasi secara epistemologis bergantung pada kejujuran dan objektivitas pelapor maupun penilai sehingga kejujuran menjadi prasyarat metodologis bagi evaluasi yang sahih, bukan sekadar nilai moral tambahan. Nilai *pinter* ditempatkan pada tahap Pengendalian karena tahap ini menuntut kemampuan menafsirkan data mutu (misalnya rapor pendidikan) untuk pengambilan keputusan perbaikan sehingga kapasitas kognitif dan analitis yang direpresentasikan nilai ini sejalan dengan tuntutan pengambilan keputusan berbasis bukti pada tahap tersebut. Adapun nilai *singer* hanya ditempatkan pada tahap Peningkatan karena secara konseptual inovasi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi merupakan prasyarat utama bagi perbaikan berkelanjutan, sedangkan pada tahap-tahap PPEPP lainnya kebutuhan terhadap kreativitas relatif lebih kecil dibandingkan kebutuhan terhadap kesehatan, kejujuran, atau kecermatan analitis. Dengan demikian, pemetaan pada Tabel 3 bersifat dominan dan bukan eksklusif artinya kelima nilai tetap dapat hadir pada tahapan lain, tetapi salah satu nilai lebih menonjol relevansinya pada tahap tertentu sesuai tuntutan fungsional tahap tersebut.

3.2.3 Pembentukan Budaya Mutu Kontekstual

Rumusan masalah ketiga mengenai bagaimana integrasi nilai *Pancawaluya* dapat membentuk budaya mutu yang kontekstual dijawab melalui dua temuan utama. Pertama, hasil kajian menunjukkan bahwa jarak antara kebijakan berbasis kearifan lokal dan praktik kelembagaan terutama disebabkan oleh persepsi guru yang memandang kebijakan tersebut sebagai beban administratif tambahan, bukan sebagai bagian yang menyatu dengan tugas pokok pendidikan (Rahman et al., 2026). Persoalan ini secara sosiologis dapat dijelaskan melalui konsep bahwa perubahan budaya organisasi memerlukan keselarasan antara elemen formal (kebijakan tertulis), informal (kebiasaan dan relasi sehari-hari), dan lingkungan (dukungan sumber daya dan kepemimpinan) sekolah (Cucchiara et al., 2025). Apabila salah satu elemen tersebut tidak selaras misalnya kebijakan formal tidak diiringi pemahaman informal warga sekolah, maka nilai lokal cenderung berhenti sebagai slogan normatif tanpa terinternalisasi dalam praktik penjaminan mutu sehari-hari.

Kedua, hasil kajian menunjukkan bahwa faktor pendukung keberhasilan integrasi meliputi kepemimpinan yang kuat, keterlibatan seluruh warga sekolah melalui pendekatan *whole-school approach* yang juga diamanatkan Permendikbudriset No. 9 Tahun 2022 serta ketersediaan sumber daya pendukung (Cahyono et al., 2025; Mulyasa & Aryani, 2022). Berdasarkan kedua temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan modifikasi terhadap kerangka penjaminan mutu konvensional yang bersifat teknokratis melalui apa yang penulis sebut sebagai Model Penjaminan Mutu Berbasis Kearifan Lokal (PMB-KL). Berbeda dari model SPMI konvensional yang memandang siklus PPEPP

semata-mata sebagai rangkaian prosedur teknis. Model PMB-KL menempatkan nilai-nilai kearifan lokal yaitu *cageur, bageur, bener, pinter*, dan *singer* sebagai lapisan pemaknaan sosial-kultural yang menyertai dan menafsirkan setiap tahapan siklus PPEPP, sehingga standar mutu tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai perwujudan nilai bersama yang disepakati komunitas pendidikan setempat. Model ini merupakan modifikasi konseptual atas pemahaman mutu yang dominan bersifat teknis birokratis dengan mengintegrasikan wawasan sosiologi pendidikan mengenai reproduksi nilai dan konstruksi sosial budaya sekolah ke dalam kerangka manajemen mutu yang selama ini berkembang di lingkungan kebijakan pendidikan Indonesia.

Model PMB-KL memiliki implikasi praktis bahwa satuan pendidikan yang hendak mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam penjaminan mutu perlu memulai dari penerjemahan nilai lokal ke dalam indikator dan praktik konkret pada setiap tahap PPEPP bukan sekadar menjadikan nilai lokal sebagai materi tambahan dalam kegiatan ekstrakurikuler semata. Selain itu, model ini menegaskan pentingnya peran kepemimpinan sekolah dalam menjembatani kebijakan formal dengan pemahaman informal warga sekolah, agar nilai lokal benar-benar terinternalisasi dan tidak berhenti sebagai simbol identitas budaya semata. Dengan demikian, budaya mutu yang kontekstual dapat dipahami sebagai hasil dari proses sosial berkelanjutan yang mempertemukan tuntutan standar formal dengan nilai-nilai yang hidup dan dianggap penting oleh masyarakat setempat.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok. Pertama, penjaminan mutu pendidikan dilihat dari perspektif sosiologi pendidikan merupakan proses konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi, kepemimpinan, dan kesepakatan nilai bersama warga sekolah, bukan semata-mata mekanisme administratif untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Kedua, kelima nilai *Pancawaluya* yaitu *cageur, bageur, bener, pinter*, dan *singer* dapat dipetakan secara koheren ke dalam siklus penjaminan mutu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sehingga berfungsi sebagai basis sosial kultural yang memberi makna pada setiap tahapan penjaminan mutu, bukan sekadar materi tambahan pendidikan karakter. Ketiga, pembentukan budaya mutu yang kontekstual membutuhkan keselarasan antara kebijakan formal, pemahaman informal warga sekolah, dan dukungan sumber daya kepemimpinan, sehingga penelitian ini mengusulkan Model Penjaminan Mutu Berbasis Kearifan Lokal (PMB-KL) sebagai modifikasi konseptual atas kerangka penjaminan mutu konvensional yang bersifat teknokratis.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kajian kepustakaan yang bersumber pada literatur sekunder sehingga model PMB-KL yang diusulkan masih bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris pada satuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu penelitian lanjutan berbasis studi lapangan, baik melalui pendekatan studi kasus maupun penelitian tindakan disarankan untuk menguji penerapan model ini pada sekolah-sekolah di Jawa Barat yang secara resmi mengadopsi *Pancawaluya* sekaligus mengeksplorasi kemungkinan adaptasi model serupa pada konteks kearifan lokal lain di Indonesia.

5. DAFTAR RUJUKAN

Aisyah, S., & Suwandi, S. (2025). Reconceptualizing cultural preservation in education: The role of school-based karawitan extracurricular activities in sustaining local wisdom. *Indonesia Journal of Local Wisdom Education (IJLWE)*, *1*(2), 43–48. https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijlwe/article/view/51456/16052

Arifianto, A. N., & Abdullah, D. (2022). Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, *1*(2), 98–105. https://doi.org/10.57251/multiverse.v1i2.602

Bernardo, A., Esteban, M., Tuero, E., Casanova, J., & Cervero, A. (2024). Editorial: Advances and new perspectives in higher education quality. *Front. Psychol*, *15*(:1395604). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1395604

Bourdieu, P. (1977). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511812507

Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1977). *Reproduction in education, society and culture*. SAGE Publications.

Cahyono, R. B., Gumelar, D. I., Mustopa, E. S., & Warta, W. (2025). Management of Panca Waluya Character Education in Fostering Wise Attitudes Toward Technology in the Digital Era. *El-Idare: Journal of Islamic Education Management*, *11*(2), 63–71. https://doi.org/10.19109/elidare.v11i2.32865

Cucchiara, M., Golann, J. W., & Diehl, D. (2025). What is school culture? Proposing a new, integrative model. *Theory and Research in Education*, *23*(2), 1–25. https://doi.org/10.1177/14778785251351272

Darmaji, D., Supriyanto, A., Adha, M. A., & Timan, A. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah di Satuan Pendidikan Dasar (Studi Kasus di SD Plus Al-Kautsar Malang): (Studi Kasus di SD Plus Al-Kautsar Malang). *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, *5*(2), 172–186. https://doi.org/10.29407/jpdn.v5i2.13190

Farhaeni, M., & Martini, S. (2023). PENTINGNYA PENDIDIKAN NILAI-NILAI BUDAYA DALAM MEMPERTAHANKAN WARISAN BUDAYA LOKAL DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *3*(2), 27–34. https://doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3483

Fazriyah, N., Hendrayana, S., Syabani, P., & Aisyah, M. A. (2026). PANCAWALUYA SEBAGAI BASIS PENDIDIKAN KARAKTER: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Al-Mizan Media Universitas Pasundan*, *2*(1), 58–68. https://journal.unpas.ac.id/index.php/almizan/article/view/48671

Fitriasari, D., Rahmawati, F. T., Cahyani, E. P., & Puspasari, E. Y. (2023). Analisis Implementasi Kegiatan P5 Sebagai Upaya Mengenalkan Kearifan Budaya Lokal Di SMAN 1 Bululawang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, *16*(2), 149–157. https://doi.org/10.17977/UM014v16i22023p149

Gusti, G., & Masduki, M. (2022). Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, *11*(1), 35–40. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10724

Hasan, M. F., Monita, D., Ar Rozi, H. A., & Sholihah, M. (2024). Reinvigorating the local wisdom of Soya-soya dance: incorporating cultural values into primary school operational curriculum innovation in South Halmahera, Indonesia. *Research in Dance Education*. https://doi.org/10.1080/14647893.2025.2570124

Istiningsih, G., & Dharma, D. S. A. (2021). INTEGRASI NILAI KARAKTER DIPONEGORO DALAM PEMBELAJARAN UNTUK MEMBENTUK PROFIL PELAJAR PANCASILA DI SEKOLAH DASAR. *JURNAL KEBUDAYAAN*, *16*(1), 25–42. https://doi.org/10.24832/jk.v16i1.447

Kurniawati, R., Amalia, A. R., & Khaleda N, I. (2022). Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui Budaya Kelas di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, *6*(5), 8304–8313. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3719

Mulyasa, E., & Aryani, W. D. (2022). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Era Merdeka Belajar. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, *08*(2), 933–944. https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.933-944.2022

Rahman, M. A., Febrianti, F. A., Jamilah, J., & Lestari, R. S. (2026). Pendampingan Implementasi Pendidikan Karakter "Pancawaluya" (Cageur, Bager, Bener, Pinter, Singer) di Sekolah. *PUBLIKASI PENDIDIKAN*, *16*(2), 1106–1112. https://doi.org/10.70713/publikan.v16i2.83725

Ramadhan, M. A., Setyaningsih, R., & Irawati, I. (2025). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kependidikan Islam*, *15*(1), 23–33. https://jurnalftk.uinsa.ac.id/index.php/JKPI/article/view/4492

Riquelme, E., Dutra, S. da C., & Paez, D. (2024). Editorial: Culture and emotion in educational dynamics. *Front. Psychol.*, *15*. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1420573

Shufa, N. K. . (2018). Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah Dasar: Sebuah Kerangka Konseptual. *INOPENDAS: Jurnal Ilmiah Kependidika*, *1*(1), 48–53. https://doi.org/10.24176/jino.v1i1.2316

Sofyan, F. S., Sundawa, D., & Wutsqah, U. (2026). Pancawaluya Character Education: Integrating Sundanese Cultural Values to Strengthen a Superior Generation in West Java. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *11*(1), 65–75. https://doi.org/10.24269/jpk.v11i1.12851

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wagiran, W. (2018). PENGEMBANGAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL HAMEMAYU HAYUNING BAWANA (Identifikasi Nilai-nilai Karakter Berbasis Budaya). *JURNAL PENDIDIKAN KARAKTER*, *3*(3), 329–339. https://doi.org/10.21831/jpk.v0i3.1249

Zed, M. (2025). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.